GAGASAN DIPLOMASI DIGITAL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA MARITIM DESA KEPULAUAN DI WILAYAH PERBATASAN DAN PENGARUH TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH NKRI

NOOR FAHMI PRAMUJI[1]

Prodi Usaha Perjalanan Wisata Universitas Khairun[,2]

Pos-el **:** noorfahmi@unkhair.ac.id

Abstrak

Gagasan diplomasi digital dalam penguatan kedaulatan wilayah indonesia melalui proses digitalisasi dapat menjadi warna baru. Penyelesaian permasalahan di kawasan perbatasan dapat dilakukan dengan diplomasi digital yang memanfaatkan teknologi, komunikasi, dan informasi. Kawasan perbatasan memiliki potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan melalui pariwisata lintas batas berbasis digital atas budaya maritim yang dimiliki. Ini menjadi upaya meningkatkan ekonomi, penguatan kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah perbatasan serta munculnya *sense of belonging* dari masyarakat atas kehadiran pemerintah dan negara melalui pembangunan di wilayah perbatasan. Upaya pengelolaan dan pengembangan wisata lintas batas dilakukan dengan melibatkan pihak pentahelix dari berbagai pemangku kepentingan. Ini sekaligus membangun legitimasi digital negara di ruang siber sehingga dapat berdampak terhadap penguatan kedaulatan wilayah NKRI di wilayah perbatasan yang diperoleh melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa kepulauan di wilayah perbatasan.

Kata Kunci: *Diplomasi, Digital, Kepulauan, Kedaulatan, Lintas-batas, Maritim, NKRI, Pariwisata, Perbatasan, Wilayah*

PENDAHULUAN

Teknologi terus mengalami perkembangan dan mempengaruhi berbagai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan teknologi di dunia hingga saat ini telah mencapai fase keempat atau fase revolusi industri 4.0. Fase perkembangan teknologi dengan karakteristik *internet of things*, *big data*, dan *cloud computing*. Secara sederahana dapat dipahami bahwa pada fase ini kehidupan masyarakat dengan segala aktivitasnya akan terhubung dengan digital, data/ informasi terintegrasi secara digital, serta internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi sehingga keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Masyarakat di fase teknologi 4.0 dikenal dengan istilah *society 4.0*. Teknologi akan selalu dinamis. Oleh karenanya, masyarakat akan bergerak pada fase selanjutnya yakni *society 5.0.* Pada fase lanjutan ini tentu digitalisasi menjadi sangat penting dalam berinteraksi dan terhubung dengan siapapun tanpa mengenal batas wilayah negara. Ketersediaan infrastruktur digital hingga pelosok daerah menjadi penting (Kominfo, 2018).

Interaksi di ruang siber, merupakan ruang yang tidak dapat diidentifikasi dan dalam konteks batas wilayah negara maka interaksi menjadi *borderless* (tanpa batas wilayah). Oleh karenanya, legitimasi dan kedaulatan wilayah negara perlu dipertegas melalui ruang siber. Hal ini dengan mempertimbangkan realitas siber merupakan realitas baru yang menjadi bagian tidak terpisah dari realitas nyata itu sendiri. Fenomena ini mempertegas bahwa kedaulatan wilayah pun harus diperkuat melalui digitalisasi dalam beragam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sebagai bentuk kesiapan berinteraksi secara global di era *society 4.0* menuju *society 5.0*.

Geografis wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dan terdiri atas pulau-pulau kecil menghadapi tantangan perubahan iklim melalui pemanasan baru. Fenomena era *society 5.0.* pun menjadi tantangan baru dalam memperkuat legitimasi agar kedaulatan wilayah tetap terjaga. Memperkuat kedaulatan wilayah harus didukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya di wilayah perbatasan.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari ribuan pulau dengan batas wilayah yang sebagian besar berbatasan langsung dengan wilayah maritim negara lain. Dengan demikian tentunya isu maritim saat ini menjadi salah satu permasalahan penting yang membutuhkan penyelesaian sesegara mungkin karena berkaitan dengan kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia (Itsnaini, 2019). Sebagai negara yang wilayah perbatasannya dititikkan pada pulau-pulau kecil terluar, secara geografis keberadaan pulau-pulau ini sangatlah strategis. Posisi pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan menjadi pintu masuk dan keluar menuju negara lain dan memiliki potensi sumber daya alam yang belum dimaksimalkan pengelolaannya termasuk potensi wisata budaya maritim menjadi alasan utama perlunya dilakukan pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut demi peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Saat ini Indonesia mencatat terdapat 111 pulau sebagai pulau kecil terluar atau pulau yang memiliki batas langsung dengan negara tetangga. Presiden Joko Widodo dalam salah satu program pembangunannya yaitu membangun daerah perbatasan, yang mencakup wilayah kepulauan, pesisir, dan wilayah perbatasan. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 bahwa dari total 111 pulau-pulau kecil terluar yang tercatat hanya sebagian kecil dari total pulau tersebut yang telah mendapatkan perhatian serta pengawasan khusus dari pemerintah.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017 bahwa permasalahan yang kerap terjadi di pulau-pulau kecil terluar yaitu:

1. Masalah pertahanan dan keamanan negara .
2. Penguasaan pulau-pulau kecil secara privat oleh pihak-pihak tertentu .
3. Penutupan akses masyarakat dan nelayan setempat oleh investor pulau-pulau kecil.
4. Banyaknya aktivis ilegal di pulau-pulau kecil terluar seperti penyeludupan manusia dan barang, narkoba, *illegal fishing,* dan lain-lain.

Merujuk pada permasalahan tersebut tentunya pengawasan serta pengelolaan yang dilakukan secara maksimal perlu dilakukan secara merata dan menyeluruh pada semua pulau-pulau kecil terluar tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan pulau-pulau tersebut memegang peranan penting dalam isu kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia.

Manfaat dan fungsi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yaitu:

1. Sebagai bentuk pertahanan dan keamanan negara.
2. Sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat daerah perbatasan.
3. Sebagai pengatur iklim global, siklus biokimia dan hirologi, sumber energi alternatif dan sistem penunjang lainnya. (BPSL Padang, 2017)

Pengembangan dan pengelolaan yang dilakukan pada pulau-pulau kecil terluar dinilai dapat memberikan dampak yang besar bagi negara, baik dari sektor pariwisata dan ekonomi juga sebagai bentuk upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Pengembangan pariwisata lintas batas dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam bawah laut maupun budaya dan tradisi maritim yang dimiliki oleh masyarakat pulau-pulau kecil terluar di wilayah perbatasan negara dapat menjadi salah satu cara meningkatkan sektor pariwisata di Indonesia (Elyta, 2021). Lokasi yang strategis akan memudahkan wisatawan asing untuk berkunjung. Adanya dukungan pemerintah untuk membangun pulau-pulau kecil terluar dengan mengelola serta menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang dapat menjadi langkah awal berkembangnya pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perbatasan.

Sebagian besar pulau kecil terluar memiliki jumlah penduduk yang sedikit bahkan ada yang tak berpenghuni. Lokasi yang terpencil serta tertinggal namun memiliki berbagai macam sumber daya alam seperti keindahan alam bawah laut serta sumber daya lainnya dapat dikelola dan dikembangkan menjadi objek dan daya tarik wisata lintas batas karena posisi strategisnya di wilayah perbatasan.

Untuk memaksimalkan pengelolaan terhadap pulau-pulau kecil terluar dalam konteks pariwisata lintas batas diperlukan adanya peran diplomasi digital. Adanya diplomasi digital sebagai media informasi dan komunikasi diharapkan dapat memudahkan promosi dalam memperkenalkan wisata lintas batas di pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perbatasan negara (Sudirman, *et.al.*, 2020) Pandemi Covid-19 pun telah menggeser cara berwisata wisatawan dari wisata massal menjadi wisata berbasis pengalaman. Pengembangan pulau-pulau kecil terluar menjadi desa wisata dengan menawarkan daya tarik wisata perpaduan budaya kearifan lokal dan potensi sumberdaya alam maritim dapat menjadi gagasan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Dalam pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi sendiri Indonesia belum maksimal. Fungsi teknologi terutama dalam diplomasi digital sebagai media promosi wisata lintas batas dapat membangun opini publik calon wisatawan untuk berwisata (Elyta, 2020). Melalui penyebarluasan informasi mengenai potensi dan aktivitas pariwisata di perbatasan serta sebagai bentuk legitimasi ruang siber atau digital untuk penegasan batas-batas wilayah kedaulatan negara baik kepada publik internasional maupun masyarakat Indonesia.

Dengan harapan dapat menimbulkan adanya rasa memiliki *(sense of belonging)* dan turut serta bekerjasama serta membantu pemerintah dalam hal pengelolaan dan pengembangan ekonomi wilayah pulau-pulau kecil perbatasan. Adanya pembangunan ekonomi di pulau-pulau kecil perbatasan menjadikan warga negara merasakan kehadiran negara, dalam hal ini pemerintah (Nasruddin, *et.al*., 2013). Secara langsung, ini akan berdampak pada penguatan legitimasi kedaulatan. Selain itu, hal ini juga dapat dilihat sebagai upaya menjaga keutuhan negara Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif analitis. Penelitian mencoba mendeskripsikan suatu gagasan yang dijelaskan secara deskriptif dan analitis untuk menjadi sebuah solusi atas permasalahan. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka atas suatu gagasan. Kajian pustaka ini dilakukan dengan pengumpulan data yang bersumber dari buku, artikel ilmiah relevan, maupun dari kajian lain serupa yang dapat mendukung penguatan terhadap gagasan. Pengumpulan data dilakukan dari sumber-sumber daring maupun luring. Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya dipilah dan diperoleh data akhir yang menguatkan gagasan. Dalam merumuskan data akhir, dilakukan analisis terhadap gagasan tersebut.

PEMBAHASAN

Posisi strategis Indonesia yang sebagian besar wilayah kedaulatannya dikelilingi laut tentunya memberikan tantangan besar bagi negara dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan negaranya. Peran diplomasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan kebijakan luar negeri serta melakukan negosiasi yang bermuara pada kesepakatan bersama dalam berbagai kepentingan salah satunya adalah penentuan batas-batas wilayah suatu negara. Sebagai negara kepulauan terbesar didunia, negara indonesia melalui peran diplomasi melakukan berbagai cara untuk menjaga kedaulatan serta keutuhan negara.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menjaga keutuhan serta kedaulatan negara salah satunya dengan dengan melakukan pengelolaaan dan pengembangan terhadap pulau-pulau kecil terluar yang berada di perbatasan wilayah Negara Republik Indonesia.

Selain ancaman dari perubahan iklim khususnya pemanasan global terhadap kedaulatan wilayah Indonesia sebagai negara maritim kepulauan, fenomena realitas siber di ruang siber sebagai realitas baru dan nyata di era *society 4.0* menuju era *society 4.0* juga perlu mendapat perhatian. Legitimasi digital juga menjadi aspek penting di era digital. Segala aktivitas di ruang siber melalui akan tersimpan dalam bentuk data yang terorganisir. Oleh karenanya, digitalisasi pun tidak terhindarkan dalam berbagai aspek berbangsa dan bernegara mencakup pembangunan ekonomi digital dan legitimasi kedaulatan digital.

Pembangunan ekonomi digital di sektor pariwisata pun perlu mendapatkan perhatian. Indonesia memiliki 111 pulau-pulau kecil terluar di wialyah perbatasan. Potensi pariwisata

perbatasan dinilai cukup besar dan luar biasa. Pulau-pulau kecil terluar ini dapat dikembangkan namun hingga saat ini hanya sebagaian kecil pulau yang dilakukan pengelolaan. Menyikapi hal tersebut pemerintah memiliki tugas pembangunan besar dalam upaya pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Pembangunan melalui pengelolaan secara merata dan maksimal terhadap pulau kecil lainnya yang belum mendapat perhatian lebih pemerintah. Ini dapat dilakukan melalui realisasi percepatan program pembangunan wilayah perbatasan berbasis kemaritiman. Hal ini menjadi penting mengingat ada begitu banyak ancaman terhadap kedaulatan serta keutuhan wilayah negara yang diakibatkan oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan yang menjadi wajah luar Indonesia. Selain itu, pulau-pulau kecil terluar di wilayah perbatasan pun termasuk pulau-pulau 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).

Banyaknya kendala dalam diplomasi wisata lintas batas dan pengelolaan serta pengembangan wisata lintasbatas, maka pemerintah perlu melakukan inovasi baru. Diplomasi digital sebagai salah satu upaya memaksimalkan fungsi teknologi, informasi, dan komunikasi untuk berinteraksi dengan masyarakat luas. Diplomasi ini merupakan bentuk spesifik dari diplomasi publik. Adanya interaksi tersebut diharapkan dapat mempengaruhi dan mengumpulkan dukungan publik domestik untuk mencapai kebijakan yang dipilih (Wangke, 2020).

Pengembangan pariwisata budaya maritim pada pulau-pulau kecil terluar di wilayah perbatasan sebagai bentuk diplomasi dalam penguatan kedaulatan wilayah indonesia dengan konsep digitalisasi dapat menjadi warna baru. Menyikapi permasalahan terkait pulau-pulau kecil terluar yang belum sepenuhnya mendapatkan perhatian pemerintah menjadi salah satu alasan munculnya gagasan ini. Pulau-pulau kecil terluar sebagai daerah perbatasan tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih. Banyaknya permasalahan yang menyebabkan kesenjangan ekonomi di wilayah perbatasan serta kurangnya pemberdayaan masyarakat setempat yang berakibat pada tertinggalnya daerah menjadi alasan gagasan upaya pengelolaan pulau-pulau tersebut. Dengan adanya pengelolaan dan pengembangan terhadap wilayah perbatasan dianggap dapat meningkatkan ekonomi, penguatan kedaulatan, dan terjaganya keutuhan wilayah perbatasan serta munculnya sense of belonging dari masyarakat atas kehadiran pemerintah dan negara melalui pembangunan di wilayah perbatasan negara.

Adanya potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan salah satunya pariwisata lintas batas berbasis digital budaya maritim tentunya dapat memberikan peluang dan dampak yang besar dalam sektor pariwisata. Seperti yang diketahui bahwa sebagian besar pulau-pulau kecil tersebut belum banyak tersentuh oleh program pembangunan nasional maupun lokal serta potensi sumberdaya alam, yang meliputi keindahan alam pulau serta alam bawah laut yang masih sangat terjaga seperti variasi flora dan fauna, geologi, air, serta keunikan dan keutuhan sumber daya alam lainnya yang dapat dikemas menjadi daya tarik wisata maritim untuk pengembangan wisata lintas batas.

Upaya pengelolaan serta pengembangan wisata lintas batas tidak hanya berfokus pada tahap pembangunan saja. Promosi wisata secara besar-besaran juga perlu dilakukan melalui pendekatan diplomasi digital dan bersifat pentahelix oleh berbagai pemangku kepentingan akan menjadi cara baru dalam mengembangkan wisata lintas batas, memberikan dampak yang besar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta membangun legitimasi digital untuk mendukung penguatan kedaulatan wilayah Indonesia di wilayah perbatasan melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar wilayah perbatasan. Diplomasi digital pariwisata budaya maritim pulau-pulau kecil terluar dapat dilakukan dengan kerjasama dan kolaborasi berbasis pentahelix, komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk membangun pulau-pulau kecil terluar yang juga termasuk pulau-pulau 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).

Menjawab Permasalahan Kedaulatan Wilayah Perbatasan RI: Gagasan Diplomasi Digital Pariwisata Lintas Batas?

Dalam menyelesaikan permasalahan kedaulatan wilayah Indonesia di wilayah perbatasan melalui pembangunan ekonomi pualu-pulau kecil terluar yaitu melalui konsep diplomasi digital berbasis pengembangan wisata lintas batas. Konsep diplomasi digital akan menjadi cara baru dalam mempromosikan wisata lintas batas serta memberikan dampak yang besar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Rangkaian aktivitas pembangunan kepariwisataan di wilayah pulau-pulau kecil terluar sebagai bagian wilayah perbatasan akan dilakukan berbasis digital. Pengembangan ekonomi digital sektor pariwisata lintas batas memerlukan kerjasama berbagai pihak, salah satunya memaksimalkan strategi pentahelix. Metode digitalisasi sebagai metode pengembangan ekonomi digital dapat dilakukan mulai dari basis data kepariwisataan digital hingga proses pemasaran dan promosi objek wisata lintas batas.

Diplomasi digital pariwisata budaya maritim pulau-pulau kecil terluar dapat dilakukan dengan cara:

1. Mendorong kebijakan nasional dan lokal yang mendukung pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk mendorong pariwisata lintas batas khususnya dalam pembangunan pulau-pulau 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) berbasis kemaritiman;
2. Penyiapan sumberdaya terampil dan professional dalam pengembangan pariwisata lintasbatas berbasis digital maritim di pulau-pulau kecil terluar wilayah perbatasan;
3. Membangun basis data *(big data)* kepariwisataan mulai dari potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dari pulau-pulau kecil terluar di wilayah perbatasan yang terintegrasi secara nasional. Ini sekaligus mendukung kebijakan nasional pemerintah Indonesia, yakni program nasional Satu Data;
4. Memaksimalkan peran para diplomat dan *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam melakukan pendekatan diplomasi digital untuk membangun opini publik calon wisatawan untuk berwisata di negara tetangga yang kedekatan wilayah geografis akan membawa kecenderungan kemiripan budaya. Dengan kata lain melalui pendekatan budaya;
5. Mendorong percepatan realisasi pembangunan ekosistem ekonomi digital di wilayah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur seperti ketersediaan sarana transportasi untuk memudahkan aksesibilitas, pembangunan menara jaringan internet berkapasitas mumpuni untuk kelancaran akses internet, akomodasi, sumberdaya kepariwisataan yang memiliki *hospitality* dan mampu memberikan pelayanan prima;
6. Mendorong keaktifan komunitas-komunitas digital Indonesia secara terorganisir dan mematuhi etika interaksi ruang siber untuk memperkuat narasi yang mendorong berwisata di pulau-pulau kecil;
7. Membuat aplikasi khusus untuk pulau-pulau kecil terluar yang memuat informasi mengenai akses, fasilitas, objek dan daya tarik wisata beserta informasi *budget* yang dapat memudahkan wisatwan dalam mencari info daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi.
8. Melakukan promosi melalui website, srta berbagai platform sosial media lainnya dengan menjadikan publik figur sebagai *brand ambassador* yang dianggap memiliki pengaruh untuk melakukan promosi sehingga dapat menarik atensi masyarakat.

Mewujudkan Gagasan Diplomasi Digital dalam Penyelesaian Masalah Kedaulatan NKRI: Pihak Berkepentingan dan Tahapan Strategi Pengembangan Pariwisata Maritim Lintas Batas

Perencanaan pengembangan pariwista budaya maritim pulau-pulau kecil wilayah perbatasan untuk memperkuat kedaulatan negara dengan konsep diplomasi digital tentunya membutuhkan kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak. Peran pemerintah dalam membantu mengimplementasikan gagasan ini yaitu dengan memulai mempertimbangkan pulau-pulau kecil terluar yang belum terjamah untuk selanjutnya dilakukan kebijakan-kebijakan tertentu serta diplomasi maritim terkait dengan penegasan batas wilayah kedaulatan negara oleh Kementrian luar negeri, kemudian selanjutnya dilakukannya observasi dengan dibantu

pihak-pihak terkait diantaranya kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif, badan nasional pengelola perbatasan, serta kementrian koordinator bidang kemaritiman terhadap potensi serta sumber daya yang terdapat di pulau-pulau tersebut untuk kemudian nantinya dapat dilakukan pemeberdayaan baik kepada masyarakat maupun sumber dayanya, dengan pengembangan serta pengelolaan lebih lanjut terhadap potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan terhadap pulau-pulau kecil terluar tadi nantinya akan didiplomasikan secara digital dengan memanfaatkan teknologi, komunikasi, dan informasi yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta tokoh publik yang mengambil peran sebagai media untuk menarik perhatian masyarakat luas dengan menggunakan berbagai *platform* sosial media sehingga masyarakat lebih mawas dan memiliki pengetahuan terhadap batas-batas wilayah negara secara detail. Hal yang diharapakan yakni adanya rasa memiliki terhadap pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan sehingga dapat membantu menjaga kedaulatan wilayah demi keutuhan negara Republik Indonesia.

Gagasan diplomasi digital dalam pengembangan pariwisata lintas batas di wilayah perbatasan melibatkan beberapa pihak kepentingan dengan peran dan fungsi yang dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Kementerian Luar Negeri

Melakukan upaya penegasan diplomasi perbatasan dalam menetapkan batas maritim Negara Republik Indonesia dan melakukan penegakan keamanan serta pengawasan ketat wilayah perbatasan. Selain itu, kementerian ini bertanggungjawab untuk sebagai penyelenggara dilakukannya pendekatan diplomasi digital ke publik dalam negeri maupun luar negeri. Kementerian Luar Negeri dapat menggiatkan keikusertaan Indonesia dalam berbagai kegiatan virtual terkait promosi kepariwisataan Indonesia kepada publik mancanegara. Para diplomat juga bisa memaksimalkan penggunaan platform media sosail lembaga maupun akun resminya untuk mengambil peran dalam mengkampanyekan beragam bentuk virtual terkait destinasi maupun atraksi wisata perbatasan.

2. Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Sebagai pihak yang melakukukan pengelolaan terhadap program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana anggaran, mengkoordinasikan program yang berjalan, serta melakukan evaluasi dan pengawasaan terhadap pengembangan dan pengelolaaan batas wilayah negara di kawasan perbatasan. Badan Pengelolaan Perbatasan di tingkat nasional perlu berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Perbatasan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Adanya integrasi dan keselarasan program kerja pusat dan daerah menjadi salah satu kunci pembangunan di kawasan perbatasan. Salah satu program kerja pembangunan kawasan perbatasan yaitu pengembangan pariwisata perbatasan dengan memperhatikan potensi pariwisata dan kearifan lokal masyarakat maritim di wilayah perbatasan.

3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sebagai pihak yang berperan besar dalam upaya pengelolaan dan pengembangan pariwisata lintas batas di daerah perbatasan serta membantu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat di wilayah perbatasan. Kementerian ini perlu menggencarkan pemetaan potensi wisata pulau-pulau kecil terluar. Setelah pemetaan potensi, kementerian ini memperkuat promosi digital dengan membuat konsep khusus pengembangan pariwisata di wilayah perbatasan atau dikenal dengan pariwisata lintas batas. Ciri khas pengembangan pariwisata ini berbasis budaya kemaritiman masyarakat di wilayah perbatasan. Potensi wisata yang dapat dikembangkan seperti wisata minat khusus, wisata selam, wisata maritim, wisata budaya. Pengembangan wisata ini tentu perlu memperhatikan aksesibilitas dan akomodasi bagi calon wisatawan. Tahap awal yang dikembangkan yaitu dengan membangun *brand* melalui wisata virtual. Ini Langkah awal promosi digital kepada calon wisatawan lokal maupun mancanegara.

Langkah selanjutnya, setelah membangun minat berwisata melalui jelajah virtual, proses pengembangan kapasitas kepariwisataan sumberdaya manusia menjadi salah satu kunci agar wisatawan merasakan pengalaman berwisata. Adanya pengalaman ini dapat

menjadi salah satu faktor daya tarik wisatawan untuk kembali berkunjung ke objek wisata. Kementerian ini juga dapat memprioritaskan penambahan jumlah desa wisata di pulau-pulau kecil terluar. Adanya desa wisata dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan *experience-based tourism* bagi wisatawan. Dikarenakan memaksimalkan pendekatan kearifan lokal maritim yang dimiliki oleh masyarakat selain menawarkan daya tarik wisata alam yang dimiliki.

4. Tokoh Publik

Public figure sebgai *icon* yang turut serta membantu melakukan promosi pariwisata budaya maritim wilayah perbatasan dapat menjadi sebuah upaya pendekatan dan pengaruh untuk mendapatkan perhatian masyarakat dengan melalui berbagai platform sosial media. Peran tokoh publik menjadi penting dalam membangun opini publik. Dalam ini membangun daya tarik berwisata kepada calon wisatawan. Kegiatan *endorsement* dengan menggunakan jasa tokoh publik yang memiliki tingkat kepedulian terhadap pengembangan pariwisata akan menjadikan objek wisata di wilayah perbatasan pun menjadi pilihan berwisata.

5. Kementerian Komunikasi dan Informasi

Kementerian ini berperan penting dalam mengatur media komunikasi serta publikasi dalam pengembangan pariwisata budaya maritim di wilayah perbatasan negara. Selain itu, kementerian ini memegang peran penting dalam pembangun infrastruktur digital di wilayah perbatasan. Diantaranya dengan memastikan kemudahan akses jaringan internet. Karena tantangan utama pengembangan digitalisasi wisata maritim di wilayah perbatasan adalah ketiadaan infrastruktur digital. Prioritas pembangunan infrastruktur digital melalui program kerja “Bakti Kominfo” ini perlu memprioritaskan pulau-pulau kecil terluar.

6. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kementerian ini berperan dalam melakukan koordinasi, pengelolaan, pengawasan serta tugas-tugas lainnya terkait dengan isu bidang kemaritiman. Peran kementerian ini adalah dengan menjamin ketersediaan investasi pengembangan pariwisata maritim di wilayah perbatasan. Adanya pembangunan ekonomi di pulau-pulau kecil terluar juga akan mendorong pencapaian Indonesia menuju poros maritim dunia. Adanya pembangunan ekonomi akan berdampak langsung bagi kedaulatan wilayah negara di kawasan perbatasan.

7. TNI dan POLRI

Peran TNI dan POLRI dalam melakukan pengawasan keamanan serta penjagaan ketat terhadap wilayah perbatasan negara Republik Indonesia. Sebagai pihak yang bertanggungjawab atas keamanan dan keutuhan wilayah di kawasan perbatasan, TNI dan POLRI dapat melakukan patroli rutin sebagai tindak pencegahan potensi ancaman di wilayah perbatasan. Faktor keamanan dan kestabilan politik di wilayah perbatasan menjadi salah satu faktor penentu bagi investor.

8. Masyarakat

Masyarakat berperan penting dalam upaya pengembangan diplomasi digital wisata lintas batas di wilayah perbatasan sebagai sumber daya manusia yang diberdayakan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat serta sebagai pihak yang mendukung upaya pengembangan dan promosi wisata lintas batas. Peran komunitas atau netizen digital yang masif dalam menarasikan daya tarik destinasi wisata dan berbagai objek wisata di pulau-pulau kecil terluar menjadi kunci strategis dalam membangun opini public serta legitimasi digital.

Adapun tahapan strategi implementasi pengembangan pariwisata lintas batas melalui diplomasi digital disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Tahapan Strategi Implementasi Gagasan Diplomasi Digital dalam Pengembanga Pariwisata Lintas Batas

No	Tahapan Kegiatan	Periode Implementasi		
		2022-2027	2027-2032	2032-2037
1	Pengusulan gagasan atau pembangunan wacana di ranah publik			

2.	Pengembangan sumberdaya manusia yang professional dan memiliki keterampilan era *society 4.0* menuju *society 5.0*.			
3.	Penguatan kelembagaan dan regulasi terkait pembangunan ekonomi sektor kepariwisataan berbasis digital melalui pendekatan diplomasi digital oleh berbagai pemangku kepentingan.			
4.	Pengembangan destinasi dan objek wisata yang memenuhi standar protokol kesehatan era pandemi maupun endemi di pulau-pulau kecil terluar			
5.	Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendukung kepariwisataan lintas-batas berbasis digital budaya maritim			
6.	Pengembangan industri kepariwisataan (pengembangan produk wisata lintasbatas yang bermutu, diatur oleh regulasi lokal dan nasional, serta pemasaran tingkat nasional, regional, dan global)			
7.	Peningkatan promosi berbasis digital dan perluasan pasar			
8.	Peningkatan pemanfaatan dan integrasi wisata lintasbatas dalam pelayanan pembangunan ekonomi nasional berbasis digital di pulau-pulau 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal)			
9.	Fasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi pelaku usaha wisata lintas batas di pulau-pulau kecil terluar dan atau pulau-pulau 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal)			
10.	Pengembangan sistem informasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual atau komunitas atas kearifan lokal masyarakat maritim di pulau-pulau kecil terluar			
11.	Pemantapan dan pelestarian budaya-budaya maritim sebagai daya tarik wisata lintasbatas pulau-pulau kecil terluar			

Membaca Peluang Masa Depan Implementasi Gagasan Diplomasi Digital Terhadap Wilayah Perbatasan NKRI dan Pariwisata Lintas Batas

Secara ringkas, implementasi gagasan diplomasi digital dalam pengembangan pariwisata lintas batas dan pengaruhnya terhadap wilayah perbatasan NKRI sebagai berikut. *Pertama*, mampu memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia melalui pengembangan pariwisata budaya maritim berbasis digital di pulau-pulau 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) wilayah perbatasan; *Kedua,* pemberdayaan masyarakat maritim serta pemaksimalan pengelolaan sumber daya alam demi meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di pulau-pulau 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) wilayah perbatasan dan menurunkan kesenjangan pembangunan ekonomi;

Ketiga, sebagai bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dalam pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi melalui pendekatan diplomasi digital di tingkat global era *society 4.0* menuju *society 5.0.* sehingga memperkuat kepemimpinan Indonesia menuju poros maritim dunia maupun di forum global negara maritim dunia. *Keempat,* peningkatan jumlah wisatawan sebagai upaya peningkatan sektor wisata lintas batas; *Kelima,* peningkatan rasa kepedulian, kesadaran, dan cinta tanah air masyarakat pulau-pulau kecil terluar di wilayah perbatasan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Pengembangan pariwisata budaya maritim pada pulau-pulau kecil terluar di wilayah perbatasan sebagai bentuk diplomasi dalam penguatan kedaulatan wilayah indonesia dengan gagasan digitalisasi dapat menjadi warna baru. Pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan terhadap pulau-pulau kecil terluar nantinya akan didiplomasikan secara digital dengan memanfaatkan teknologi, komunikasi, dan informasi. Adanya pengelolaan dan pengembangan terhadap wilayah perbatasan dianggap dapat meningkatkan ekonomi, penguatan kedaulatan, dan terjaganya keutuhan wilayah perbatasan serta munculnya *sense of belonging* dari masyarakat atas kehadiran pemerintah dan negara melalui pembangunan di wilayah perbatasan negara. Adanya potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan salah satunya pariwisata lintas batas berbasis digital budaya maritim tentunya dapat memberikan peluang dan dampak yang besar dalam sektor pariwisata. Upaya pengelolaan serta pengembangan wisata lintas batas tidak hanya berfokus pada tahap pembangunan saja. Promosi wisata secara besar-besaran juga perlu dilakukan melalui pendekatan diplomasi digital dan bersifat pentahelix oleh berbagai pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi cara baru dalam mengembangkan wisata lintas batas dan membangun legitimasi digital untuk mendukung penguatan kedaulatan wilayah Indonesia di wilayah perbatasan melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar wilayah perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

BPSL Padang. 2020. *Pulau-pulau Kecil Terluar*. URL: https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/page/4440-pulau-pulau-kecil-terluar. Diakses tanggal 21 Maret 2022.

Elyta, Nuzulian, U. 2020. Diplomasi Indonesia Berbasis Program *Cross Border Tourism* dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara. *Insignia Journal of International Relations.* 7(1): 1-16.

Elyta, dan Nuzulian, U. 2021. *Diplomasi, Politik Pariwisata dan Studi Perbatasan*. Cetakan Pertama. Top Indonesia. Pontianak.

Itsnaini, Ibtihaj. 2019. Road Map Diplomasi Maritim Indonesia*. Skripsi.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Jember.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2022. *Daftar Pulau-Pulau Terluar Indonesia*. URL: https://regional.kompas.com/read/2022/01/20/141632578/daftar-pulau-terluarindonesia-dari-aceh-hingga-papua. Diakses tanggal 24 Maret 2022.

Kominfo. 2018. *Kejar Indonesia Merdeka Sinyal, 2020 BAKTI Geber Bangun BTS di Desa.* URL: https://www.kominfo.go.id/content/detail/15477/kejar-indonesia-merdeka-sinyal-2020-bakti-geber-bangun-bts-di-desa/0/sorotan_media. Diakses tanggal 24 Maret 2022.

Nasruddin, Utomo, W., Muta'ali, L., Ritohardoyo, S., Suharyadi, R., Poniman, A. Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai Beranda Depan NKRI. *Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan XVI Ikatan Geograf Indonesia.* 2-3 November 2013. Banjarmasin, Indonesia. Hal.652-665.

Presiden Republik Indonesia. 2017. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar*. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

Sudirman, F., A., Sarma, W., D., Susilawaty, F., T. 2020. Promosi Pariwisata Melalui Digital Diplomasi: Upaya Internasionalisasi Pariwisata Daerah. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*. 5(3): 174-185.

Wangke, H. 2020. *Diplomasi Digital dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.